



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROSLIANI
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 6361

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.190.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 826 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 725.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 329.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 65.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 160.657.468**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.744.657.468**III. HUTANG** Rp. 65.283.477**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.679.373.991



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.